

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi terhadap pelaku pembunuhan kejahatan pembunuhan menurut pengadilan dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn telah dilaksanakan dengan baik sesuai KUHAP yang secara efektif dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) Terdakwa. Bukti krusial yang digunakan yaitu Surat Penolakan Tindakan Medis yang ditanda tangani oleh Saksi, keterangan Terdakwa dan Saksi, serta penyitaan barang bukti berupa obat aborsi dan rekaman CCTV yang saling berhubungan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kematian bayi tersebut terkait langsung dengan tindakan pidana Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 133 KUHAP yang menjadi dasar utama bagi penyidik untuk menginisiasi tindakan otopsi dengan mekanisme permintaan keterangan ahli atau *visum et repertum* (VER) dan Pasal 134 yang membahas mengenai prosedur dan pengecualian pelaksanaan otopsi di mana otopsi hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Sehingga dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn tidak perlu dilakukannya otopsi VER untuk menjatuhkan hukuman dan bukti forensik.

2. Alasan penyidik tidak melakukan otopsi dalam perkara tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn adalah adanya Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terutama ditopang oleh bukti kesengajaan berupa surat penolakan perawatan bayi dan bukti perbuatan berupa pengakuan dari terdakwa dan saksi, obat penggugu kandungan, dan

rekaman CCTV, meskipun bukan oleh bukti forensik yang ideal. Artinya, putusan ini sah karena memenuhi batas minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, meskipun tidak didasarkan pada dari aspek kedokteran forensik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas terdapat saran sebagai berikut :

1. Penyidik harus secara konsisten menerapkan Undang-undang dan Pasal Pasal yang berlaku dalam KUHAP dengan standar wajib otopsi untuk setiap kasus kematian yang diduga karena tindak pidana untuk memaksimalkan kinerja dan kewenangan yang dimiliki.
2. Perlunya memperkuat koordinasi antara unit Reserse Kriminal yaitu Penyidik dengan unit Kedokteran dan Kesehatan atau Puslabfor sejak tahap penemuan jenazah untuk segera menentukan kebutuhan otopsi dan mempermudah dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- SH, DR Tri Astusi Handayani. (2018) *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Nusamedia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2009) Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indrati Soeprapto, M. F. (2016). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kencana

B. Jurnal

- Alfarobbi, K. A., & Ubaidillah, L. U. (2025). Analisis Hukum terhadap Sanksi kepada Penyidik Kepolisian yang Tidak Segera Menyerahkan Berkas kepada Penuntut Umum dalam Perkara dengan Kualifikasi Ringan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*
- Amalia, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Excellent Midwifery Journal
- Apriliani, K., Zuhir, M. A., & Yuningsih, H. (2025). *Penerapan Metode Scientific Crime Investigation Pada tindak pidana Pembunuhan*. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin,
- Avianti, F. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)
- Bambang, F. (2017). *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polresta Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)
- Boleng, T. K., & Yusuf, H, 2024. *Efektivitas hukum dalam tindakan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan*. *Jurnal Inovasi Global*

- Boleng, T. K., & Yusuf, H. (2024). *Efektivitas hukum dalam tindakan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan*. Jurnal Inovasi Global
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). *Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
- Dm, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*
- Dumais, J. (2015). *Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap)*. Lex Crimen
- Ekaputri, A. B. (2023). *Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Acara Pidana*.
- Ely, S., & Simangunsong, F. (2023). *Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
- Ferynaldo, R, 2024. *Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan berencana*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
- Hamzah, A. (2018). Perbedaan kewenangan, kekuasaan, dan wewenang dalam hukum administrasi. *Junal Hukum Pembangunan*
- Haq, I. (2020). *Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif*. Istimbath: Jurnal Hukum
- Hariyanto, H. (2025). *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik Sebagai Perwujudan Peran Negara Dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Puskokkes POLRI)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hutahaeen, A., & Indarti, E. (2019). *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia
- Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
- Indrati Soeprapto, M. F. (2016). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kencana

- Inggria, D., Bella, W. G. O., dkk. (2025). *Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan di Wonogiri*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
- Irmawati, M. (2022). *Efektifitas Petunjuk Dan Prosedur Pengiriman Barang Bukti Dalam Pelayanan Pemeriksaan Di Subbid Kimia Biologi Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan* (Doctoral Dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Jauhani, M. A., Pratiwi, Y. W., & Supianto, S. (2023). *Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*. WELFARE STATE Jurnal Hukum
- Juliani, H. (2018). *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara*. *Administrative Law and Governance Journal*,
- Jurnal Litbang Polri. (2025). *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Siber."* *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepolisian*
- Kastubi, K. (2016). *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana*. Spektrum Hukum
- Kurnia, K., Pawennei, M., & Assaad, A. I, 2023. *Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*
- Laia, F. F. D. (2024). *The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code*. SIGn Jurnal Hukum
- Lasut, M. (2016). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Lex Crimen
- Lestari, H. P. (2015). *Peranan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Melanggar Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Polresta Samarinda*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*,
- Lestari, T., & Koswara, I. Y. (2022). *Kaitan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
- M. Alvan Nur Rosyid, dkk. (2025). *Integrasi bukti forensik dalam konstruksi kausalitas tindak pidana*. Jurnal Dinamika Hukum
- Makie, I. (2016). *Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap*. Lex Privatum

- Makie, I. (2016). *Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap*. Lex Privatum
- Makie, I. (2016). *Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap*. Lex Privatum
- Maulana, R. (2024). *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid/2010*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
- Maulidian Nugroho, dkk. (2023). *Pemeriksaan post-mortem dalam kedokteran forensik: Analisis patologis dan implikasi hukum*. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). *Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil*. Jurnal Legislasi Indonesia
- Nugroho, B. (2017). *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Yuridika
- Ohoiwutun, Y. T. (2016). *Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana*. Jurnal Yudisial
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2025). *Kajian Yuridis terhadap Peran Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
- Parlindungan, F. (2018). *Peran Otopsi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan oleh Kepolisian (Studi Polsek Tanjung Morawa)*Langi, L. F. (2019). *Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kuhap*. Lex Crimen
- Pilok, D. F. (2013). *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*.
- Pranadita, N., & Wiradirja, I. R. (2020). *Peran Penting Analisis Swot Dalam Implementasi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA),
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). *Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Retentum
- Putri, D. C., Angga, R. D., & Yusuf, H. (2024). *Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Kepastian Hasil Otopsi Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Menurut Kedokteran Forensik*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara

- Putri, Mutia Hafina, & Akhmad, Heri. (2025). *"Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Investigation Process In The Criminal Justice System)." Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG)*
- Rachmad, A. (2019). *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*
- Ramadhan, A. (2021). *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. Lex Renaissance*
- Ramdani, M. F. (2024). *Analisis Uu No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam.*
- Rizky, D. F. (2022). *Kedudukan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Sukabumi Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).*
- Rozi, F. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja*
- Sagai, B. Y. D. (2017). *Aspek hukum terhadap autopsi dalam tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun. Lex Crimen.*
- Santi, F., Nopalina, F., Mahendra, D. A., & Alfian, D. (2024). *Peran dokter forensik dalam penegakan hukum: Kontribusi terhadap proses penyidikan dan pembuktian pidana. Innovative: Journal Of Social Science Research*
- Sawitri, R., Dewi, T. N., & Dhanardono, T. (2024). *Perspektif Hukum dan Praktik Kedokteran Forensik Perkembangan dan Tantangan Implementasi Virtual Autopsy di Indonesia. Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*
- Setyowati, D. B., dkk. (2022). *Urgensi Pembuktian Ilmiah dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi*
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). *Kekuatan Pembuktian Autopsi Medis: Analisis Forensik Terhadap Kasus Pidana Pembunuhan. Jurnal Intelek Insan Cendikia*
- Sianipar, Iriana, & Pratiwi, Yulita. (2022). *"Penguatan Kedudukan Hukum Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Reformasi Penegakan Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2025). *Integrasi Hukum Dan Kedokteran Forensik: Menyongsong Keadilan Melalui Bukti Medis Dalam Proses Hukum. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*

- Simatupang, D. P. (2020). *Definisi penyidik menurut KUHP dalam praktik peradilan. Jurnal Dinamika Hukum*
- Sofian, A. (2025). *Pentingnya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kematian*. Business Law, Rubric of Faculty Members
- Sutomo, S. (2023). *Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian Di Polres Blora) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U, 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 74– 82
- Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdesettya, H. (2025). *Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
- Wibowo, B. D., & Pratiwi, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Forensik Akibat Salah Memberikan Keterangan Visum Et Repertum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- Widia, L. (2024). *Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
- Wiratraman, H. P., Wahyuningrum, S. L., & Simatupang, D. P. (2020) *Merumuskan Kebijakan Negara dalam Rangka Menindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh*

C. Website

- Setiawan, E. (2025). Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/wenang>
- Bayi yang Dibuang di Sukowati Bojonegoro Sempat Digugurkan dan Dikubur, Pelaku Kabur ke Surakarta - Surya.co.id
- Imam Nurcahyo. (2024, September 24). *Sesosok Mayat Bayi Laki-laki Ditemukan di Area Persawahan Kapas, Bojonegoro*. BeritaBojonegoro.com. <https://beritabojonegoro.com/read/26105-sesosok-mayat-bayi-laki-laki-ditemukan-di-area-persawahan-kapas-bojonegoro.html> , diakses 21 November 2025
- Anggun. (2023). *Jenis Pelimpahan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/jenis-pelimpahan-wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara/?lang=i> diakses 24 Oktober 2025

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Kapolri Nomor INSE/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Pemermintaan Visum dan Otopsi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedokteran Forensik.

E. Sumber Lain

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn

